

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN BAGI SUBJEK HUKUM PRIBADI  
PENYELENGGARA NEGARA DITINJAU DARI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNCTO UNDANG-UNDANG  
NOMOR 20 TAHUN 2001  
TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI “GRATIFIKASI”**



**Disusun Oleh :**

**Achmad Yusuf**  
**NIM 02111002**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

**2016**

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

### DAFTAR ISI

### BAB I : PENDAHULUAN

|   |    |
|---|----|
| 1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah .....            | 1  |
| 1.2 Penjelasan Judul .....                              | 6  |
| 1.3 Alasan Pemilihan Judul .....                        | 11 |
| 1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....      | 14 |
| 1.5 Metode Penelitian.....                              | 15 |
| 1.5.1 Tipe Penelitian .....                             | 15 |
| 1.5.2 Pendekatan ( <i>approach</i> ) .....              | 15 |
| 1.5.3 Sumber bahan hukum ( <i>legal sources</i> ) ..... | 16 |
| 1.6 Pertanggungjawaban Sistematika .....                | 17 |

### BAB II: GRATIFIKASI YANG DIBERIKAN KEPADA PENYELENGGARA NEGARA YANG TERMASUK DALAM RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA KORUPSI.....18

|   |    |
|---|----|
| 2.1. Mengidentifikasi Batasan Gratifikasi Bagi Penyelenggara Negara Menurut KPK ..... | 18 |
| 2.2. Pengaturan dan Pemberian Sanksi Tindak Pidana Korupsi      Gratifikasi           | 20 |

### BAB III: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYELENGGARA NEGARA YANG TELAH MENERIMA GRATIFIKASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN KORUPSI “GRATIFIKASI” .....28

|  |           |
|--|-----------|
| 3.1. Perlindungan Hukum Bagi Penyelenggara Negara Terhadap Gratifikasi<br>Yang Diterima Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999<br>Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001..... | 28        |
| 3.2. Konflik Kepentingan Dalam Gratifikasi.....  | 35        |
| 3.3. Contoh dan Analisa Kasus Gratifikasi Menurut KPK .....  | 38        |
| <b>BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>   | <b>44</b> |
| 4.1. Kesimpulan.....   | 44        |
| 4.2. Saran.....  | 45        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>47</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>   | <b>49</b> |

## ABSTRAK

Gratifikasi merupakan kejahatan tindak pidana korupsi yang sangat mengganggu integritas serta moral Penyelenggara Negara. Ketika seorang Penyelenggara Negara menerima hadiah yang berbau gratifikasi tentunya si pemberi gratifikasi akan mempengaruhi wewenang serta tanggung jawab Penyelenggara Negara tersebut dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan jabatan dan tanggung jawab Penyelenggara Negara tersebut. Gratifikasi merupakan kejahatan luar biasa, dan tentunya perlu penanganan kasus yang luar biasa juga. peraturan yang mengatur gratifikasi tertuang pada pasal 12b dan 12c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dalam peraturan tersebut tidak secara jelas membedakan mana pemberian yang dapat ditujukan kepada subjek pribadi Penyelenggara Negara, batasan dalam pasal tersebut adalah apabila pemberian tersebut berkaitan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sehingga ketika seorang Penyelenggara Negara agar dapat mengetahui adanya indikasi tindak pidana korupsi maka pemberian tersebut harus dilaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari sejak penerimaan tersebut diterima.

Kata kunci: gratifikasi, kejahatan luar biasa, subjek pribadi

## *ABSTRACT*

*Gratification are crimes of corruption are very disturbing moral integrity as well as the State Organizer. When a State Officials receive a gift giver would smelled gratification gratification will affect the authority and responsibility of the State Officials in decisions relating to the position and responsibilities of the State Organizer. Gratification is an extraordinary crime, and certainly needs an exceptional case handling as well. the rules governing gratuities contained in Article 12b and 12c of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001, the regulation does not clearly distinguish which gifts can be directed to the personal subject of State Officers, restrictions in the article is that if the provision relating to the position and contrary to the obligations or duties. So that when a State Officers to be aware of any indication of corruption then the gift should be reported to the Commission no later than 30 days after such acceptance is received.*

*Keywords: gratification, extraordinary crime, personal subject*

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Gratifikasi dari penjelasan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, Bahwa gratifikasi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya mengkhianati integritas serta moralitas seorang penyelenggara Negara terhadap jabatannya tetapi juga melukai kepercayaan masyarakat Indonesia yang telah mempercayakan tanggung jawab mengemban tugas Negara kepada penyelenggara Negara tersebut.
2. Tidak adanya penjelasan yang tegas mengenai batasan jumlah dan kriteria pemberian yang diperbolehkan kepada penyelenggara negara saat mendapatkan hadiah atau pemberian yang ditujukan untuk diri pribadi penyelenggara Negara pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena seorang penyelenggara Negara juga memiliki kehidupan sosial yang suatu saat akan menemukan kondisi menerima pemberian dari teman, saudara yang juga berprofesi sebagai

pengusaha/rekanan dalam tender negara, akan tetapi terdapat klasifikasi antara gratifikasi legal (yang diperbolehkan) dan gratifikasi ilegal (yang tidak diperbolehkan) dengan mengacu pada penjelasan KPK dalam buku memahami gratifikasi bahwa gratifikasi yang legal adalah gratifikasi yang diberikan tanpa adanya *vested interest*, dalam batas kewajaran, dan tidak berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara Negara, namun jika penyelenggara Negara tersebut ingin mendapatkan kejelasan (*vested interest*) terhadap pemberian yang diterimanya, harus melakukan pelaporan kepada KPK selambat-lambatnya 30 hari sejak barang tersebut diterima mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

#### **4.2 Saran**

1. Gratifikasi yang telah ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang sangat membayakan bagi proses birokrasi di Indonesia, sehingga seharusnya mendapatkan perhatian khusus dalam pengaturannya, yaitu terdapat Undang-Undang khusus yang mengatur kejahatan tersebut bagi penyelenggara Negara.
2. Indonesia merupakan Negara yang tidak lepas dari adat ketimuran yang sangat menghormati seseorang dengan memberikan sesuatu berupa oleh-oleh jika mengunjungi suatu tempat, memberikan sumbangan/hadiah jika teman/kerabat/saudara mempunyai hajatan berupa pernikahan, khitanan ataupun acara adat yang lain, jika pemberian-pemberian tersebut membuat

seorang penyelenggara Negara was-was atau gusar untuk menerimanya bahkan cenderung menolak dalam pemberian tersebut tentunya juga tidak baik dalam proses kehidupan sebagai subjek pribadi masyarakat penyelenggara Negara tersebut, maka dari itu perlu adanya pengaturan yang jelas yang tertuang dalam undang-undang mengenai pemberian yang diperbolehkan bagi subjek pribadi penyelenggara Negara tersebut mulai dari jenis pemberiannya dan jumlah pemberiannya sehingga hal tersebut memberikan kejelasan serta keuntungan baik bagi penyelenggara Negara sendiri ketika menerima suatu pemberian bagi subjek pribadinya yang tidak perlu lagi meragukan serta takut status pemberian tersebut menyeretnya kepada kejahatan tindak pidana korupsi, juga bagi KPK akan lebih memudahkan kembali dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi karena kejelasan jenis serta jumlah yang ditetapkan dalam undang-undang akan memantapkan langkah KPK dalam melakukan penangkapan koruptor ini, dan tidak ada alasan lagi ketika penangkapan dilaksanakan koruptor tersebut berkilah akan melaporkan pemberian kepada KPK.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Literatur

Arifin P. Soeriaatmadja, *Pengkajian Hukum Tentang Tanggung Jawab Pejabat Negara Dalam Harta Kekayaan*, BPHN, Jakarta, 2005.

Black, Henry Campbel, MA, *Black's Law Dictionary 4<sup>th</sup> Edition*, 1968.

Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2005.

Indonesia Corruption Watch, *Studi Tentang Penerapan Pasal Gratifikasi Yang Dinggap Suap Pada Undang – Undang Tipikor*, 2014

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, Jakarta, 2010.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003

R. Wiyono, *Pembahasan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2002.

Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Pengantar Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1999.

Setiono, *Rule of Law*, Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004

Soetjipto Raharjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni Bandung, Bandung, 1983.

## **2. Perundang-Undangan**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

Surat Edaran KPK nomor B.143/01-13/01/2013 tentang himbauan terkait gratifikasi.

SEMA Nomor 3 tahun 1963 jo Pasal 31 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Tindak Pidana Korupsi “Gratifikasi”.

## **3. Media Elektronik**

<http://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/gratifikasi/faq-gratifikasi> diakses 15 mei 2016